

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pembangunan perekonomian masyarakat terus gencar dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberantas kemiskinan di seluruh daerah. Agar pembangunan perekonomian lebih efektif dan terfokus, pemerintah memusatkannya pada unit terkecil, yaitu desa. Pembagian unit tersebut bertujuan agar pembangunan ekonomi dapat merata di setiap daerah, sehingga masyarakat di wilayah tertinggal dapat dijangkau serta diberdayakan secara maksimal. Hasil yang dicapai diharapkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlanjutan program pemberdayaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total populasi Indonesia adalah 284.438.800 orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2024 turun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024), sedangkan di pedesaan turun sebanyak 0,57 juta orang (dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024). Pada September 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp595.242,00 per kapita per bulan, terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 151.809,00 (25,50 persen) (Badan Pusat Statistik, 2024).

Perekonomian kota cenderung lebih maju dibandingkan perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang merata agar masyarakat desa juga dapat merasakan kesejahteraan. Namun, dalam pembangunan desa sering terjadi kendala seperti program yang tidak tepat sasaran akibat minimnya partisipasi masyarakat, serta dominasi pemerintah dalam perencanaan program. Otonomi daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatur dan mengurus kepentingan wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah

Sinta Juliana, 2025

IMPLEMENTASI STRATEGI TERPADU BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) NIAGARA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS ANGGOTA WIRAUSAHA DESA WANGISAGARA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

otonom memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” (BPK RI, 2004). Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal melalui lembaga ekonomi desa. Dalam situasi ini, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan ekonomi desa sekaligus kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial (Republik Indonesia, 2014).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga. Menurut Pasal 87 Ayat (1) UU Desa, BUMDes bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, selain menghasilkan keuntungan finansial (BPK RI, 2014).

Bentuk implementasi peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pengelolaan pasar desa. BUMDes Niagara di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, telah menginisiasi program pasar desa sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan penciptaan wirausaha lokal. Program ini menggunakan pendekatan strategi terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek pemberdayaan. Namun, dalam implementasinya, program pasar desa yang dikelola BUMDes Niagara menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan sembilan indikator pemberdayaan, terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi, yaitu peningkatan kapasitas, penguatan jaringan, dan peningkatan akses. Permasalahan pada ketiga indikator ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang menghambat perkembangan pasar desa.

Keterbatasan dalam peningkatan kapasitas berdampak pada lemahnya jaringan usaha. Meskipun strategi terpadu telah diterapkan, belum terlihat peningkatan signifikan pada kapasitas wirausaha pedagang pasar desa. Kondisi ini menjadi krusial mengingat pasar desa adalah salah satu ujung tombak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegagalan dalam meningkatkan kapasitas wirausaha dapat mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi desa serta penurunan daya saing pasar desa terhadap pasar modern. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam implementasi strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Niagara, khususnya pada program pasar desa. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara penerapan strategi terpadu dengan realitas lapangan terkait peningkatan kapasitas anggota. Analisis mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendukung, evaluasi efektivitas program, serta perumusan rekomendasi strategi pemberdayaan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Penelitian ini menawarkan pembaruan pada beberapa aspek, antara lain fokus pada pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi dan kewirausahaan melalui BUMDes di Desa Wangisagara, penggunaan strategi terpadu yang menggabungkan pendekatan pembangunan, kesejahteraan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat, dengan penekanan pada pengembangan pasar desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi indikator keberhasilan keberlanjutan pasar desa serta faktor ketidakberhasilan peningkatan kapasitas anggota.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul **"Implementasi Strategi Terpadu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara dalam Meningkatkan Kapasitas Anggota Wirausaha Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung"**. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini memiliki BUMDes yang telah menerapkan program pasar desa dengan strategi terpadu, namun menghadapi tantangan pada aspek peningkatan kapasitas anggotanya, sehingga relevan untuk dikaji sebagai studi kasus.

Sinta Juliana, 2025

IMPLEMENTASI STRATEGI TERPADU BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) NIAGARA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS ANGGOTA WIRAUSAHA DESA WANGISAGARA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perencanaan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya?
- 1.2.3 Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan strategi terpadu BUMDes Niagara dalam peningkatan kapasitas anggota program Pasar Desa Wangisagara. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengidentifikasi perencanaan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya.
- 1.3.2 Menganalisis penerapan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya.
- 1.3.3 Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan strategi terpadu oleh pengelola BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat melalui program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori adopsi inovasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks strategi pemberdayaan BUMDes Niagara dalam meningkatkan kapasitas wirausaha melalui strategi terpadu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis: Sebagai sarana pembelajaran untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai strategi pemberdayaan BUMDes Niagara dalam peningkatan kapasitas wirausaha melalui strategi terpadu.
2. Bagi Lembaga Akademik: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang melakukan kajian terkait pemberdayaan BUMDes.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes: Sebagai masukan untuk evaluasi dan penyempurnaan strategi pemberdayaan yang telah diterapkan, agar lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Perencanaan Strategi Terpadu oleh BUMDes Niagara dalam Meningkatkan Kapasitas Wirausaha Masyarakat terhadap Program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya

Penelitian ini akan mendalami proses perencanaan strategi terpadu yang dilakukan BUMDes Niagara guna meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat. Pembahasan mencakup analisis tahapan perencanaan strategis, seperti identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan potensi lokal, penentuan

sasaran pemberdayaan, serta perumusan program kerja yang responsif dan partisipatif. Aspek penting lainnya adalah keterlibatan aktor lokal, integrasi nilai sosial dan ekonomi, serta kesesuaian perencanaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil di pasar desa.

1.5.2 Penerapan Strategi Terpadu oleh BUMDes Niagara dalam Meningkatkan Kapasitas Wirausaha Masyarakat terhadap Program Pasar Desa Wangisagara, Majalaya

Penelitian ini juga menelusuri sejauh mana strategi terpadu yang telah dirancang benar-benar diterapkan dalam operasional pasar desa. Fokus analisis meliputi implementasi program pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, fasilitasi pemasaran, serta penguatan kelembagaan usaha masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan, menilai efektivitas strategi dalam meningkatkan keterampilan, daya saing, dan kemandirian pelaku wirausaha pasar desa, serta meninjau sinergi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat.

1.5.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Keberhasilan Strategi Terpadu oleh BUMDes Niagara

Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal maupun eksternal yang menjadi penghambat pencapaian peningkatan kapasitas wirausaha, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan kebijakan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian juga akan mengungkap faktor pendukung keberhasilan dan keberlanjutan program, seperti komitmen kelembagaan BUMDes, dukungan regulasi desa, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan adaptasi program terhadap dinamika sosial dan ekonomi loka.